

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyusunan laporan keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, serta realisasi anggaran dari setiap entitas pelaporan, baik entitas individual maupun entitas konsolidasian. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan berbagai standar dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaporan keuangan di seluruh entitas pemerintahan, salah satunya adalah melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. (Risal and Ilham n.d.)

Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan informasi mengenai kondisi keuangan dan posisi keuangan juga hasil operasi dari suatu induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan tunggal. (Taufiq Khaerudin 2023)

Kesulitan Eliminasi Transaksi Antar Unit Pada saat konsolidasi, transaksi antar bagian sering tercatat ganda sehingga menimbulkan laporan yang tidak akurat. Pengelolaan Data Keuangan yang Kurang Rapi Dokumen pendukung transaksi seperti SPJ, bukti belanja, atau laporan aset kadang tidak lengkap, sehingga memperlambat proses konsolidasi.

PSAP Nomor 11 memberikan pedoman teknis bagi entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, yaitu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan, arus kas, serta aktivitas seluruh entitas pelaporan di bawah satu entitas induk sebagai satu kesatuan ekonomi. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyusunan laporan keuangan konsolidasian menjadi penting karena mencerminkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan, termasuk oleh perangkat daerah seperti Sekretariat DPRD.

Menurut (Kasmir, 2019) Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. (Afiyah, Arsy, and Engkus 2021)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu entitas akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas legislatif, seperti penyusunan anggaran daerah, pengawasan, dan pembuatan peraturan daerah. Sebagai entitas yang mengelola anggaran cukup besar untuk mendukung operasional dan layanan kesekretariatan, Sekretariat DPRD berkewajiban menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menerapkan PSAP Nomor 11 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Hal ini diperlukan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya, memudahkan analisis, dan menjadi dasar pengambilan keputusan baik oleh DPRD maupun pemerintah daerah secara keseluruhan.

Penerapan PSAP Nomor 11 tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ketidakakuratan atau ketidak lengkapan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik, kualitas pengawasan oleh DPRD, serta efektivitas pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana penerapan PSAP Nomor 11 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi agar dapat dirumuskan upaya perbaikan ke depan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.11 belum sepenuhnya optimal di berbagai pemerintah daerah. Misalnya, penelitian oleh Sari (2018) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan, PSAP No.11. Penelitian oleh Simanjuntak dan Sihombing (2020) di Kota Medan juga menemukan adanya kelemahan dalam proses eliminasi transaksi antar entitas.

Sementara itu, Lestari (2021) dalam penelitiannya di Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten menyatakan bahwa penerapan PSAP No.11 masih bersifat parsial akibat kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.11 masih menjadi tantangan tersendiri di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pada Sekretariat DPRD Nias Barat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAP No.11 dalam penyusunan laporan keuangan di Sekretariat DPRD Nias Barat, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Penerapan PSAP No.11 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Sekeretariat DPRD Kabupaten Nias Barat”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah adalah “ Bagaimana Penerapan PSAP No.11 Dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) tentang laporan keuangan konsolidasian pada sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan PSAP Nomor 11 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian di lingkungan pemerintahan daerah.

2. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang transparan dan akuntabel.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait

Sebagai referensi dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi yang sesuai, khususnya PSAP Nomor 11.

4. Bagi Pembaca

Sebagai referensi dan literatur tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan di sektor publik

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis dan sumber Data

M.Sobry Sutikno, Prosmala hadi (2020) Saputra Penelitian kualitatif sebagai salah satu metodologi dalam penelitian belum memiliki definisi yang baku dan disepakati penggunaannya secara umum. Kendati demikian, definisinya dapat disimpulkan lebih komprehensif-integratif melalui penelusuran definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, sehingga membentuk sebuah definisi yang utuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. (Safrudin et al. 2023)

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai penerapan PSAP No.11 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat.

1. Sumber data:

Data Primer: Diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Sekretariat DPRD yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian, serta observasi langsung terhadap proses penyusunan laporan.

Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen-dokumen seperti peraturan pemerintah terkait SAP, PSAP No.11, dokumen laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya

2. Jenis Data

Data kualitatif data tentang sifat teks, kata, atau gambar. Jenis data yang dibutuhkan adalah wawancara, observasi dan dokumen.

2. Metode pengumpulan Data

1. Observasi, Peneliti melakukan observasi langsung ke Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat untuk melihat dan mencatat proses penyusunan laporan keuangan sebelum dan sesudah dilakukan konsolidasi. Observasi ini meliputi pengecekan dokumen laporan, prosedur kerja, serta penggunaan standar akuntansi pemerintahan (PSAP No.11). Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan dan kesesuaian penerapan standar.
2. Wawancara, menurut pendapat dari Sugiyono (2017:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumentasi, Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang relevan, seperti Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta laporan konsolidasian Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat. Data dokumentasi ini berguna sebagai bukti tertulis untuk mendukung hasil observasi dan wawancara, serta untuk membandingkan kesesuaian laporan dengan PSAP No.11.